

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Otonomi daerah di Indonesia yang dimulai pada tahun 1988 dengan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, kemudian mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, membuat perubahan yang sangat mendasar dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sistem pengelolaan sumber pendapatan daerah. Pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota diberi kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama dan kewenangan lain yang ditetapkan peraturan pemerintah. Sebagai konsekuensi dari kewenangan otonomi yang luas, pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata dan berkesinambungan.

Pemerintah daerah sebagai pihak yang disertai tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Hasil analisis rasio keuangan ini selanjutnya digunakan untuk tolok ukur dalam:

- a. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
- b. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
- c. Mengukur sejauh mana aktivitas Pemerintah Daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
- d. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
- e. Melihat pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Wijayanti, (2007) meneliti analisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Boyolali tahun anggaran 2003 sampai dengan tahun 2005. Wijayanti, melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui

kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali tahun anggaran 2003-2005. Hasil penelitiannya menunjukkan rasio kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat masih relatif rendah.

Gani, (2010) meneliti analisis perkembangan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2006-2008. Gani melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2006-2008. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 mengalami perkembangan yang sifatnya konstan.

Rusydi, (2010) meneliti analisis determinan kinerja keuangan pemerintah daerah dan detensi ilusi fiskal (studi kasus Propinsi di Indonesia tahun 2005-2008). Rusydi melakukan penelitian dengan tujuan untuk menganalisis determinan kinerja keuangan pemerintah di era otonomi serta mendeteksi fenomena ilusi fiskal pada Pemerintah Daerah Propinsi di Indonesia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat hubungan saling mempengaruhi yang signifikan antara sisi penerimaan (PAD) dengan sisi pengeluaran (belanja daerah). PAD mampu meningkatkan belanja daerah sebesar 0,67 juta rupiah setiap kenaikan 1 juta belanja daerah. Selain itu,

penelitian ini juga menemukan bahwa tidak terdapat ilusi fiskal di dalam kinerja keuangan Pemerintah Daerah Propinsi.

Dama, (2012) meneliti Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2008-2010. Dama melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui kinerja keuangan APBD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2008-2010. Hasil penelitian menunjukkan kinerja keuangan APBD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2008-2010 tergolong baik jika ditinjau dari tingkat efektivitas dan pertumbuhan belanja operasi. Sedangkan jika ditinjau dari tingkat kemandirian, efisiensi keuangan daerah dan keserasian masih kurang baik. Dengan demikian kinerja keuangan APBD Kabupaten Gorontalo Utara dari tahun 2008 sampai tahun 2010 masih tergolong kurang baik.

Pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir ini, tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 kinerja keuangan daerah berdasarkan tingkat efisiensi dan efektivitas suatu program kegiatan, serta pencapaian sasaran dan tujuan berdasarkan misi dan visi Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, dijelaskan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Kabupaten Gorontalo Utara dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah semaksimal mungkin telah mempertimbangkan aspek

sosial dan ekonomi meskipun belum seluruhnya memenuhi aspek-aspek tersebut. Berikut beberapa fenomena yang terjadi:

1. Keterbatasan sumber pendanaan dalam pembangunan daerah baik dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana transfer dan bagi hasil pajak yang berimbas pada kurangnya pendapatan.
2. Penyerapan dana yang belum maksimal karena adanya keterlambatan anggaran yang masih berkaitan dengan pihak pusat.
3. Belanja daerah yang terlalu rendah sehingga mengakibatkan beberapa program kerja yang tidak terlaksanakan dengan baik.
4. Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi namun belum terkelola dengan baik.
5. Tidak tercapainya target anggaran yang dianggarkan pada tahun 2010.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS PERKEMBANGAN KINERJA KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA”.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana perkembangan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara jika dilihat dari analisis rasio keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2008-2012?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui seberapa besar perkembangan kinerja keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara selama tahun 2008-2012.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, manfaat penelitian ini adalah diharapkan dapat menjadi pengembangan ilmu akuntansi khususnya bidang akuntansi sektor publik. Disamping itu, diharapkan pula dapat menjadi literatur untuk penelitian sejenis di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, manfaat penelitian ini adalah diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran terhadap Bupati, DPRD, Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara khususnya terkait dengan analisis kinerja keuangan.

